Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

The Existence of Paralegals in Providing Legal Aid to the Poor

Eka N.A.M Sihombing

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: Maret 2019; Disetujui: Juni 2019; Dipublish: Juni 2019

*Corresponding Email : sihombingeka@gmail.com

Abstrak

Untuk memenuhi kebutuhan hak atas bantuan hukum bagi setiap orang miskin yang berhadapan dengan hukum tentunya dibutuhkan peran paralegal untuk menangani perkara non-litigasi maupun litigasi, Namun, ketentuan peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum secara litigasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan karenanya tidak berlaku umum. Dengan demikian, pasca putusan MA tersebut Paralegal tidak lagi dapat memberikan bantuan hukum litigasi. Adapun yang berwenang melakukan bantuan hukum secara litigasi di pengadilan hanya Profesi Advokat

Kata Kunci: Paralegal, Bantuan Hukum, Masyarakat miskin

Abstract

The role of paralegals is needed to handle cases of non-litigation and litigation to fulfill the need for legal aid rights for the poor in facing the law, however, the provision of the role of paralegals in providing litigation legal assistance as stated in article 11 and article 12 Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia number 1 of 2018 concerning paralegals in the provision of legal assistance based on the Supreme Court decision number 22 P / HUM / 2018 was declared contrary to the higher laws and regulations, namely Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and hence not generally accepted. Thus, after the Supreme Court's ruling, paralegals can no longer provide legal litigation aid. Advocate are the only professions who are authorized to carry out legal aid in litigation and court

Keywords: Paralegals, Legal Aid, Poor People

How to Cite: Sihombing, E.N.A.M. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. 6 (1) 2019 : 70 – 77.

PENDAHULUAN

Salah satu unsur penting dalam prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap asas *equality before the law* (Persamaan dihadapan hukum). Asas tersebut mengandung makna bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan tanpa memandang status sosialnya. Di Indonesia, secara konstitusional Pengakuan terhadap asas dimaksud termaktub dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum termasuk dilihat dari perspektif *gender* maupun jenis kelamin maupun posisi-posisi yang dianggap lemah seperti penyandang disabilitas, fakir miskin maupun terhadap kaum minoritas dan lain sebagainya.

Perlakuan yang sama dihadapan hukum ini sangat berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan bantuan hukum terutama bagi masyarakat miskin sebagai wujud jaminan keadilan bagi setiap orang. Oleh karena itu, Winarta (2011:101) menyatakan bahwa bantuan hukum (*legal aid*) selain merupakan hak asasi manusia juga merupakan gerakan konstitusional.

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Dalam praktiknya, Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai (lihat Penjelasan UU 16/2011). Hal tersebut mendasari terbentuknya Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH). UUBH ini pula yang menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Salah satu hambatan keberhasilan dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin adalah sebaran pemberi bantuan hukum yang tidak merata. Berdasarkan catatan YLBHI, hingga kini sedikitnya ada 405 OBH yang memberikan pelayanan kepada 28.005.410 orang penduduk miskin. Dengan jumlah tersebut maka satu OBH harus melayani 67.000 orang miskin. Seluruh OBH tersebut tersebar di 127 Kabupaten dan Kota. Padahal, sedikitnya tercatat ada 516 Kabupaten dan Kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Artinya, masih ada 389 Kabupaten dan Kota yang tidak terjangkau oleh OBH (kompas.com).

Dengan demikian, guna memenuhi kebutuhan hak atas bantuan hukum bagi setiap orang miskin yang berhadapan dengan hukum tentunya dibutuhkan peran paralegal untuk menangani perkara non-litigasi maupun litigasi. Untuk mengakomodir hal tersebut Kementerian Hukum dan HAM RI pada 17 Januari 2018 mengundangkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Permenkumham Paralegal). Dalam Permenkumham tersebut dinyatakan bahwa Paralegal yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan Paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.

Ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Paralegal disebutkan bahwa Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar.

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang sama. Pendampingan tersebut meliputi: a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pendampingan advokat ini dibuktikan dengan surat keterangan pendampingan dari advokat yang memberikan Bantuan Hukum.

Namun, ketentuan peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham, Paralegal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan karenanya tidak berlaku umum. Putusan tersebut dianggap sebagian pihak sebagai langkah mundur, dikarenakan peran paralegal sangat penting untuk memenuhi hak setiap warga negara miskin untuk mendapatkan bantuan hukum. Berdasarkan hal tersebut menarik untuk diulas lebih lanjut perihal bagaimana eksistensi paralegal dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin terutama pasca putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, perjanjian. Adapun sifat penelitian yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah preskriptif, berpegang pada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam kegiatan penelitian hukum harus dapat dan mungkin untuk diterapkan (Marzuki, 2011). Lebih lanjut Marzuki (2011) menyatakan oleh karena itu yang dihasilkan oleh penelitian hukum, sekalipun bukan asas hukum yang baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru (Marzuki, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Atas Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Secara konsepsional, menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara (Sunggono dan Harianto, 2001) apabila ditinjau dari tujuan, orientasi, sifat, cara pendekatan dan ruang lingkup aktifitas program bantuan hukum, khususnya bagi golongan miskin dan buta hukum di Indonesia pada dasarnya dapat dikategorikan pada dua konsep pokok, yaitu: konsep bantuan hukum tradisional dan konsep bantuan hukum konstitusional.

Konsep bantuan hukum tradisional merupakan pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual dan bersifat pasif, dan pendekatannya juga formal legal, dalam artian melihat segala permasalahan hukum kaum miskin semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku (Sunggono dan Harianto, 2001). Sedangkan, Konsep Hukum Konstitusional adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti (Sunggono dan Harianto, 2001): *a) menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum, b) penegakan dan pengembangan nilai-nilai HAM sebagai sendi utama bagi tegaknya hukum*. Sifat dari jenis bantuan hukum konstitusional ini lebih aktif, dimana bantuan hukum tidak saja diberikan secara individual akan tetapi

juga kepada kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif (Sunggono dan Harianto, 2001).

Sejalan dengan hal tersebut, hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang mendapatkan jaminan konstitusional bagi setiap orang dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum. Meskipun tidak setiap warga masyarakat bersentuhan langsung dengan sistem peradilan, akan tetapi mereka perlu diberi pengetahuan bahwa hukum dan kelembagaannya menghargai hak-hak mereka dan seluruh lembaga tersebut dapat bertanggungjawab kepada masyarakat (Balitbangham, 2004). Ketentuan ini tidak perlu terhambat hanya dikarenakan mahal biaya dan kerumitan sistem atau faktor lain. Keadilan dan kemampuan untuk memberdayakan masyarakat harus tersedia sama untuk semua warga masyarakat tanpa adanya diskriminasi (Balitbangham, 2004).

Dalam perkembangannya, muncul konsep bantuan hukum yang dipopulerkan oleh Lembaga Bantuan Hukum, yaitu Konsep bantuan hukum struktural. Menurut pencetusnya, konsep bantuan hukum struktural berkait erat dengan masalah kemiskinan struktural (Sunggono dan Harianto, 2001). Bantuan Hukum struktural merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil, dengan demikian kegiatan bantuan hukum tidak semata-mata memberikan pelayanan hukum terhadap kasus-kasus yang ada, akan tetapi harus lebih mampu untuk memilah serta memanfaatkan kasus-kasus yang mampu mendorong terwujudnya kondisi bagi efektifitas pelaksanaan hak-hak masyarakat miskin (Sunggono dan Harianto, 2001).

Secara konseptual, menurut Makinara (2013) UUBH telah mengadopsi bantuan hukum struktural secara terbatas, hal ini didasarkan pada beberapa hal

sebagai berikut (Makinara, 2013) : *Pertama*, bantuan hukum dibeikan kepada masyarakat miskin baik secara perseorangan maupun kolektif, dengan permohonan tertulis ataupun tidak tertulis (lisan) yang disertai dengan persyaratan surat keterangan miskin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; *kedua*, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUBH pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin untuk dilakukan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah terverifikasi dan terakreditasi; *Ketiga*, Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum dengan jalur litigasi dan non litigasi. Pemberian bantuan hukum melalui jalur litigasi dan non litigasi ini berdasarkan ketentuan Pasal 9 UUBH *juncto* Pasal 11 Permenkumham Paralegal dapat dilakukan baik oleh advokat maupun paralegal.

Peran Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

Untuk memenuhi kebutuhan hak atas bantuan hukum bagi setiap orang miskin yang berhadapan dengan hukum dan untuk mengatasi sebaran pemberi bantuan hukum yang tidak merata, tentunya dibutuhkan peran paralegal untuk menangani perkara non-litigasi maupun litigasi. Rikardo Simarmata sebagaimana dikutip Wiratraman (2016) menyatakan bahwa Paralegal muncul dalam perjalanan panjang kerja lembaga-lembaga bantuan hukum, memainkan peranan penting dalam memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat, mendidik, melakukan penyadaran, melakukan analisis sosial, advokasi, membantu pengacara, melakukan mediasi dan mengumpulkan dokumentasi.

Paralegal merupakan pembantu advokat pengacara yang melakukan praktik dan pelayanan terhadap klien yang menghadapi permasalahan hukum (lihat Warjiyati, 2017). Lebih lanjut Warjiyati (2017) menguraikan bahwa:

“Di beberapa negara seperti Amerika Serikat para ahli hukum mengakui paralegal adalah profesi yang berada langsung di bawah supervisi pengacara. Namun di Inggris Raya didefinisikan profesi bukan pengacara tetapi mengerjakan pekerjaan legal terlepas siapa yang mengerjakannya. Meski demikian tidak ada definisi yang konsisten mengenai paralegal seperti: peranan dan pekerjaan, status, syarat dan kondisi kerja, training, peraturan peraturan atau apa pun sehingga setiap yuridiksi harus memandang secara individual.”

Dalam buku Penuntun untuk Latihan Paralegal (Ravindran (ed), 1989), disebutkan bahwa Paralegal adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, baik hukum acara (formil) maupun hukum materil dan motivasi, sikap serta keterampilan untuk: 1) Melaksanakan program-program pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan menyadari hak-haknya; 2) Memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka bisa menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka; 3) Membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi perselisihan; 4) Melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi sebelum ditangani pengacara; 5) Membantu pengacara dalam membuat pernyataan-pernyataan (gugatan/pembelaan), mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi.

Lebih lanjut dalam buku tersebut juga diuraikan fungsi-fungsi yang harus dijalankan paralegal, yaitu (Ravindran (ed), 1989) : *a.* Memfasilitasi pembentukan organisasi rakyat, *b.* Mendidik dan melakukan penyadaran, *c.* Melakukan analisis sosial, *d.* Advokasi, *e.* Membimbing, melakukan mediasi dan mendamaikan, *f.* Bantuan hukum, *g.* Jaringan kerja, *h.* Mendorong masyarakat mengajukan tuntutan-tuntutannya, *i.* Dokumentasi, *j.*

Mengkonsep surat-surat, *k.* Membantu pengacara.

Istilah paralegal dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 9 dan Pasal 10 UUBH, namun ketentuan UUBH tidak memberikan definisi, fungsi dan kewenangan paralegal, demikian pula dalam ketentuan Permenkumham Paralegal yang seyogyanya mengatur lebih rinci mengenai paralegal, namun sangat disayangkan definisi mengenai Paralegal juga tidak diketemukan. Dalam ketentuan Pasal 2 Pemenkumham paralegal ini hanya menyebutkan bahwa Paralegal yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan Paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum. lebih lanjut ketentuan Pemenkumham ini juga tidak memuat secara tegas pembatasan kewenangan Paralegal dalam pemberian bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Sehingga, wajar saja apabila sebahagian pihak mengkhawatirkan peran paralegal akan dapat menggantikan bahkan mengambil alih peran dari advokat, hal tersebut pula yang mendasari pengujian ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Paralegal.

Eksistensi Paralegal Pasca Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018

Pada awal April 2018, 18 (delapan belas) advokat mengajukan permohonan pengujian materi terhadap beberapa ketentuan yang terdapat dalam Permenkumham Paralegal diantaranya ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12. Dalam permohonannya para advokat tersebut meminta agar majelis hakim menyatakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 12 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat. Para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dimaksud berpotensi menimbulkan kebingungan dan

ketidakpastian dalam masyarakat serta diduga mengambilalih kedudukan profesi Advokat. Lebih lanjut pemohon menyampaikan bahwa:

“dengan dinyatakan dalam: Pasal 11 bahwa “...*Paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dan nolitigasi setelah terdaftar pada Pemberian Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan tingkat dasar....*”; dan Pasal 12 bahwa : “... *Paralegal dapat melakukan pendampingan sebagaimana meliputi: a) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; b) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau c) pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara*) *Pendampingan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan pendampingan dari advokat yang memberikan Bantuan Hukum....*”;

Maka menimbulkan kebingungan kepada masyarakat sehingga muncul pertanyaan baru antara lain: apakah perbedaan antara Paralegal dengan Advokat? Apakah Paralegal itu adalah Advokat? atau apakah Advokat itu adalah Paralegal ?; Hal ini merupakan akibat frasa dan pada Pasal 11 serta dan/atau pada Pasal 12 yang menyebabkan kedudukan Paralegal menjadi sama dengan Profesi Advokat sehingga Permenkumham RI Nomor 01 Tahun 2018 jelas bertolak belakang dan diduga ada penyeludupan kedudukan Profesi Advokat melalui Permenkumham Paralegal yang dapat diambil alih oleh Paralegal;

Bahwa dengan adanya Uji Materiil atas Permenkumham RI Nomor 01 Tahun 2018 ini adalah jelas-jelas penolakan dari Para Advokat Indonesia atas aturan tentang Paralegal dalam PERMENKUMHAM RI Nomor 01 Tahun 2018 sehingga bagaimana mungkin Para Advokat Indonesia dapat memberikan

Surat Keterangan bagi Paralegal untuk melakukan litigasi? hal ini bertentangan dengan Definisi Advokat dan Jasa Hukum pada Pasal 1 Undang-Undang Advokat;”

Atas permohonan tersebut dalam rapat permusyawaratan majelis hakim tanggal 31 Mei 2018 diputuskan bahwa ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam salah satu butir pertimbangannya majelis hakim berpendapat bahwa:

“Pasal 11 dan Pasal 12 objek permohonan hak uji materiil (HUM) memuat norma yang memberikan ruang dan kewenangan kepada Paralegal untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Ketentuan tersebut dapat dimaknai Paralegal menjalankan sendiri proses pemeriksaan persidangan di pengadilan, dan bukan hanya mendampingi atau membantu advokat. Ketentuan normatif mengenai siapa yang dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan telah diatur di dalam Pasal 4 juncto Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang pada pokoknya hanya advokat yang telah bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi yang dapat menjalankan profesi advokat untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan.

Bahwa dengan demikian muatan materi Pasal 11 dan Pasal 12 objek HUM bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian melanggar asas *lex superior derogate legi inferior*, sehingga bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”

Berdasarkan putusan tersebut, maka pemberian bantuan hukum secara litigasi

oleh Paralegal tidak memiliki legitimasi yuridis. Apabila merujuk pada penafsiran majelis hakim yang tertuang dalam pertimbangannya yang memaknai bahwa ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 memberikan ruang dan kewenangan bagi Paralegal menjalankan sendiri proses pemeriksaan persidangan di pengadilan, dan bukan hanya mendampingi atau membantu advokat sebenarnya tidak memiliki *ratio legis*, hal ini dikarenakan rumusan Pasal 12 yang berbunyi “..... dalam bentuk pendampingan advokat...” mengandung makna bahwa Paralegal dalam melaksanakan tugasnya memberikan bantuan hukum secara litigasi pada prinsipnya tidak menjalankan sendiri, akan tetapi dalam naungan supervisi advokat, sehingga kedudukan antara Paralegal dengan Profesi Advokat tidak mungkin dipersamakan. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa muatan materi Pasal 11 dan Pasal 12 objek HUM bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian melanggar asas *lex superior derogate legi inferior* tidak beralasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 maupun Pasal 12 Permenkumham Paralegal sebenarnya memiliki tujuan untuk memenuhi hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan permasalahan hukum di seluruh pelosok negeri yang notabene tidak terakomodir oleh sebaran advokat yang ada.

Berdasarkan data BPHN Hingga saat ini, tercatat ada 524 Organisasi Bantuan Hukum telah terakreditasi dan terverifikasi, dengan total advokat sebanyak 2.557 advokat. Jumlah advokat tersebut, masih sangat minim dibanding dengan jumlah penduduk, di tambah sebaran Organisasi Bantuan Hukum pada Kabupaten/Kota belum merata. Dari 514 Kabupaten/Kota, baru 512 Kabupaten/Kota yang telah memiliki Organisasi Bantuan Hukum di wilayahnya

(bphn.go.id, 2019). Selain itu, meskipun berdasarkan peraturan perundang-undangan Advokat dibebani kewajiban juga untuk memberikan bantuan hukum secara *pro deo* bagi masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum, namun menurut Suhayati (2012) minat advokat untuk menjalankan kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara *pro deo* masih rendah, dikarenakan sanksi yang diberikan kepada Advokat yang melanggar kewajiban tersebut sangat ringan. Lebih lanjut Suhayati (2012) menyatakan bahwa:

“UU Advokat bahkan tidak mengatur sanksi apapun bagi advokat yang tidak melaksanakan kewajiban ini. Sanksi bagi advokat yang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma diatur dalam Pasal 14 PP Nomor 83 Tahun 2008 yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau pemberhentian tetap dari profesinya. Sanksi yang sama diberikan juga bagi advokat yang dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari Pencari Keadilan. Pemberian sanksi ini dilakukan oleh Organisasi Advokat dimana advokat tersebut menjadi anggota dan sebelum advokat dikenai tindakan dimaksud, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.”

Dengan demikian, seharusnya peran Paralegal dalam memberikan bantuan hukum secara litigasi semakin diperkuat, bukan malah didelegitimasi. mengenai Yang pada akhirnya berdampak terhambatnya perluasan *access to justice* terutama bagi masyarakat miskin yang sedang menghadapi permasalahan hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 22P/HUM/2018,

kewenangan paralegal dalam memberikan bantuan hukum secara litigasi dalam bentuk : *a.* pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; *b.* pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau, *c.* pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak lagi memiliki legitimasi yuridis. Paralegal hanya berwenang memberikan bantuan hukum secara non litigasi. Adapun yang berwenang melakukan bantuan hukum secara litigasi di pengadilan hanya Profesi Advokat.

Dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum secara litigasi, diperlukan penataan regulasi khususnya yang mengatur keparalegalan. Pengaturan tentang kewenangan keparalegalan tersebut harus dirumuskan dalam tataran Undang-Undang yang menegaskan batas-batas kewenangan paralegal.

Selain itu perlu didorong agar dilakukan percepatan pemerataan advokat diseluruh pelosok negeri dan penegasan pemberian sanksi kepada advokat yang mengabaikan kewajiban pemberian bantuan hukum secara *pro deo* bagi masyarakat miskin melalui perubahan Undang-Undang tentang Advokat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia dan Sentra Hak Asasi Manusia Universitas Indonesia, (2004) Pemenuhan Hak Bagi Setiap Orang untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Semenjak Penyidikan

sampai Putusan Pengadilan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia dan Sentra Hak Asasi Manusia Universitas Indonesia, Jakarta.

BPHN, BPHN Susun Standar Layanan Minimum Bantuan Hukum bagi Orang Miskin, dalam <https://bphn.go.id/news/2019021512422874/BPHN-Susun-Standar-Layanan-Minimum-Bantuan-Hukum-Bagi-Orang-Miskin> tanggal 15 Pebruari 2019

Kompas, Putusan MA Terkait Peran Paralegal Dinilai Batasi Perluasan Bantuan Hukum dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/16/14085101/putusan-ma-terkait-peran-paralegal-dinilai-batasi-perluasan-bantuan-hukum> tanggal 16 Juli 2018

Makinara, I.K. (2013), Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Meninjau Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum), *Jurnal Rechtsvinding*, 2(1):1-15

Marzuki, P.M, (2011). Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Kencana Media.

Ravindran, D.J. (ed), (1989) Buku Penuntun Untuk Pelatihan Paralegal, Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Suhayati, M. (2012), Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma oleh Advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *Jurnal Negara Hukum*, 3(2):227-248.

Sunggono, B & Harianto, A, (2001), Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung, Mandar Maju

Warjiyati, S. (2017), Pemberdayaan Paralegal Aisyiyah Ranting Sukodono dalam Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak, *Jurnal Dimas*, 17(2):175-192.

Winarta, F.H. (2011), Bantuan Hukum di Indonesia (Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara, Jakarta, Kompas Gramedia.

Wiratraman, H.P. (2016), Mempertimbangkan Kembali Orientasi Gerakan Bantuan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Veritas et Justitia*, 2(2):466-487.